

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu yang menjadi tujuan dalam pendirian perusahaan adalah dapat meningkatkan kesejahteraan dan dapat memaksimalkan akan kekayaan pemiliknya atau pemegang saham dengan suatu cara yaitu dengan meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan adalah tolak ukur akan keberhasilan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan. Tujuan dari menganalisis tentang laporan keuangan perusahaan, yaitu agar dapat mengevaluasi dan menilai suatu kinerja yang pada khususnya manajemen perusahaan dalam suatu periode akuntansi, serta untuk menentukan strategi apa yang diterapkan pada periode berikutnya jika dalam tujuan perusahaan sebelumnya telah tercapai.

Laporan keuangan perusahaan perbankan digunakan oleh Bank Indonesia agar dapat menilai suatu bank apakah bank tersebut merupakan perusahaan yang sehat atau tidak. Dengan suatu keadaan yang seperti ini para manajer memanfaatkan untuk memanipulasi data dalam suatu laporan keuangan perusahaan. Hal tersebut agar perusahaan yang tanggung jawabnya di bawah manajer masuk dalam kriteria yang telah disyaratkan oleh Bank Indonesia. Dalam meminimalisasi adanya manipulasi data yang dilakukan oleh para manajer dan dalam mensejahterakan para pemilik atau pemegang saham, maka cara yang tepat digunakan adalah *corporate governance*.

Penerapan dan pengelolaan *corporate governance* yang baik atau yang sering dikenal dengan *good corporate governance* adalah sebuah konsep yang menekankan bahwa hak pemegang saham sangat penting dalam mendapatkan sebuah informasi yang akurat, tepat waktu dan benar. Selain itu juga menunjukkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosure*) semua informasi kinerja keuangan perusahaan dengan akurat, tepat waktu, dan transparan. Oleh karena itu, baik perusahaan publik maupun tertutup harus memandang *good corporate governance* (GCG) tidak hanya di jadikan sebagai aksesoris belaka, tetapi mengupayakan untuk meningkatkan kinerja keuangan (Darmawati, 2004).

Peningkatan nilai kinerja keuangan perusahaan yang sangat tinggi merupakan jangka panjang yang seharusnya dicapai oleh perusahaan yang akan tercemin dari harga pasar sahamnya karena penilaian investor dapat diamati melalui pergerakan harga saham perusahaan yang ditransaksikan di bursa untuk perusahaan yang sudah *go public*. Dalam proses memaksimalkan nilai perusahaan akan muncul konflik antara manajer dengan pemegang saham (pemilik perusahaan) yang sering disebut *agency problem*. Tidak jarang pihak manajemen yaitu manajer perusahaan mempunyai tujuan dan kepentingan lain yang bertentangan dengan tujuan utama perusahaan dan sering mengabaikan kepentingan pemegang saham. Perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut *agency conflict*, hal tersebut terjadi karena manajer lebih mengutamakan kepentingan pribadi, sebaliknya pemegang saham tidak menyukai dari

kepentingan manajer karena apa yang dilakukan manajer tersebut akan menambah biaya bagi perusahaan sehingga menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan dan berpengaruh terhadap nilai kinerja keuangan perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Wien Ika Permanasari, 2010:1).

Penerapan *good corporate governace* juga menjadi sebuah permasalahan dalam peningkatan nilai kinerja keuangan perusahaan di dunia perbankan. Semenjak krisis keuangan yang terjadi di Negara Indonesia tahun 1997 yang mana telah menghancurkan berbagai sendi perekonomian yang salah satunya perbankan, yang mengakibatkan krisis perbankan terparah dalam sejarah perbankan nasional yang menyebabkan penurunan kinerja perbankan nasional.

Dalam seminar restrukturisasi perbankan di Jakarta pada 1998 dapat disimpulkan beberapa yang menyebabkan menurunnya kinerja perbankan, antara lain semakin meningkatnya kredit yang bermasalah di dunia perbankan, yang menyebabkan bank harus menyediakan cadangan penghapusan hutang yang begitu besar sehingga mengakibatkan kemampuan bank untuk memberikan kredit menjadi sangat terbatas; dampak likuiditas bank yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan pemerintah, sehingga memicu penarikan dana yang secara besar-besaran, semakin turunnya permodalan bank-bank, banyak bank yang tidak mampu melunasi kewajibannya karena menurunnya nilai tukar rupiah, manajemen bank yang sangat tidak profesional.

Melihat kondisi yang sangat bermasalah, pemerintah mengambil langkah untuk menjalankan kebijakan reformasi perbankan pada Maret 1999 dengan melakukan penutupan bank, pengambilalihan 7 bank, rekapitalisasi 9 bank, dan mengintruksikan kepada 73 bank agar tetap mempertahankan operasinya tanpa melakukan rekapitalisasi sehingga tahun 2001 jumlah bank yang tersisa sebanyak 151 bank. Selain melaksanakan kebijakan reformasi perbankan, pada tahun 2004 pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) melakukan fundamental terhadap perbankan nasional dengan dikeluarkannya API (Arsitektur Perbankan Indonesia). Dan tidak hanya berhenti sampai disitu, untuk menunjukkan keseriusannya terhadap isu *corporate governance* (CG), pada tanggal 26 Januari 2006 Bank Indonesia (BI) mengeluarkan paket kebijakan perbankan yang lebih dikenal dengan istilah Pakjan 2006, yang mana isinya mengenai peraturan baru tentang pelaksanaan *good corporate governance*, bagi bank umum berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/14/2006.

Penerapan *good corporate governance* ini dinilai dapat memperbaiki citra dunia perbankan yang sempat buruk, melindungi kepentingan *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika-etika umum pada industri perbankan dalam rangka mencitrakan sistem perbankan yang sehat. Selain itu penerapan *good corporate governance* di dalam perbankan diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan, dikarenakan penerapan *corporate governance* ini

dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi resiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri.

Kajian tentang *corporate governance* sangat meningkat dengan pesat seiring dengan terungkapnya skandal keuangan yang berskala besar meliputi Enron, Tyco, Worldcom, Merck, Global Crossing mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat yang mana melibatkan akuntan, salah satu elemen penting dari *good corporate governance*. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia seperti, PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk (Boediono, 2005) juga melibatkan pelaporan keuangan (*financial reporting*) yang berawal terdeteksi adanya manipulasi.

Dari contoh kasus tersebut diatas, sangat relevan apabila ditarik sebuah pertanyaan tentang efektivitas penerapan *corporate governance*. hal tersebut membuktikan bahwa lemahnya akan praktik *corporate governance* di Indonesia yang mengarah adanya defisiensi dalam pengambilan keputusan dan tindakan perusahaan (Alijoyo, dkk., 2004). Dalam perusahaan perlu diajukan sebuah konsep *corporate governance* untuk peningkatan kinerja perusahaan dan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang transparan dalam melakukan laporan keuangan.

Corporate governance adalah salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham, dan *stakeholders* lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi untuk penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan

sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Darmawati, dkk., 2004).

Good Corporate Governance atau Tata kelola Perusahaan yang baik akan membantu terciptanya suatu hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan antara elemen dalam perusahaan (Komposisi Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Direksi dan para pemegang saham) untuk meningkatkan kinerja keuangan.

Sifat usaha yang spesifik dari institusi perbankan ini mendorong topik penelitian dalam industri perbankan dewasa ini yang mengarah pada masalah *corporate governance*, terlebih lagi setelah beberapa Negara Asia terkena krisis finansial. Institusi keuangan perbankan memiliki usaha yang spesifik (*nature of the firm*) yang membedakannya dari institusi non-keuangan (Macey dan O'Hara dalam Supriyatno, 2006). Dengan adanya *good corporate governance* dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan, maka penulis mengambil judul **“ANALISIS PENGARUH KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS, KOMPOSISI DEWAN DIREKSI, STRUKTUR KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN DI INDONESIA PADA TAHUN 2007-2010”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Komposisi Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Direksi, Struktur Kepemilikan Manajerial, dan Struktur Kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan signifikan secara individual terhadap Kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2010?.
2. Apakah Komposisi Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Direksi , Struktur Kepemilikan Manajerial, dan Struktur Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2010?.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh positif dan signifikan secara individual antara Komposisi Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Direksi, Struktur Kepemilikan Manajerial, dan Struktur Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2010.
2. Mengetahui pengaruh signifikan secara simultan antara Komposisi Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Direksi, Struktur Kepemilikan Manajerial, dan Struktur Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2010.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan di dunia akademik, dari penelitian ini diharapkan bermanfaat dan sebagai literatur bagi peneliti lain yang melakukan penelitian mengenai pengaruh Komposisi Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Direksi, Struktur Kepemilikan Manajerial dan Struktur Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan suatu perusahaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang peranan dan praktik Komposisi Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Direksi, Struktur Kepemilikan Manajerial, dan Struktur Kepemilikan Institusional dalam meningkatkan kinerja keuangan.
- b. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sangat bermanfaat dalam mengambil keputusan investasi khususnya dalam menilai suatu kinerja keuangan perusahaan berdasarkan Komposisi Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Direksi, Struktur Kepemilikan Manajerial dan Struktur Kepemilikan Institusional.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar penulisan, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan diuraikan pada bab ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini terdapat landasan teori yang mendasari penelitian ini dan pembahasan singkat dari beberapa penelitian terdahulu. Dalam bab ini juga akan membahas bagaimana kerangka pemikiran yang mendasari hipotesis penelitian dan menjelaskan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan definisi operasional variabel.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab keempat menjelaskan tentang analisa data deskriptif, analisa data terhadap pengujian hipotestis serta pengujian asumsi klasik, dan pembahasan secara teoritik baik secara kuantitatif dan statistik.

BAB V : KESIMPULAN dan SARAN

Bab kelima menjelaskan tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, saran atas penelitian ini, serta implikasi. Dengan keterbatasan penelitian diharapkan penelitian ini dapat disempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.